

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut diharapkan terjadi pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir. Aplikasi SISKEUDES dimaksudkan untuk mendukung pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa khususnya pengelolaan anggaran desa dimana harus bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dan Habatan Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES :

1. Semua aparatur desa di Desa Kiuoni tidak semua mampu dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Hanya bendahara saja yang mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES namun masih sering mengalami kesulitan dalam meng-*entry* data.
2. Masyarakat Desa Kiuoni belum memahami pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa. Oleh karena itu perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan desa.
3. Latar belakang pengelola keuangan desa mayoritas adalah SLTA. Realisasi antara kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh.
4. Di desa Kiuoni Sumberdaya Manusia (SDM) lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat

mengikuti perubahan-perubahan terhadap sistem akuntansi dan teknologi informasi yang ada.

5. Kantor Desa Kiuoni sendiri memiliki 2 buah Laptop dan 2 buah printer untuk mendukung aktivitas di kantor. Akan tetapi kemampuan aparatur desa untuk mengoperasikannya masih sangat rendah.
6. Di Desa Kiuoni tidak teraliri aliran listrik sehingga pemerintah desa sering mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki 1 buah genset yang di gunakan untuk mendukung kegiatan operasional di kantor namun genset tersebut bukanlah solusi yang bai karena sering mengalami kerusakan.
7. Lemahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan terkait Akuntansi dan Teknologi Informasi pada perangkat desa masi sangat rendah.

6.2 Saran

Berkaitan desan hasil penelitian ini maka, penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Akuntansi, sebaiknya pemerintah desa perlu mengikuti pelatihan secara kontinyu dan merata. Pemerintah desa juga seharusnya melakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan yang diikuti. Kemudian perlunya pencatatan jumlah pelatihan dan pelatihan apa yang telah diikuti oleh perangkat desa untuk mempermudah evaluasi kinerja berdasarkan pelatihan yang telah diikuti.
2. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Perlunya pengadaan aliran listrik di Desa Kiuoni agar dapat memudahkan kegiatan operasional di kantor desa.
4. Perlunya peningkatan kuantitas pada user Aplikasi SISKEUDES agar tercipta efisiensi waktu dan tenaga dalam penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, S. (2016). *E-budgeting* (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Ayu, L., Sitti, N. N., & Jaka, D. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi Pada Lima Desa Di Kecamatan*
- Blue Print e-government* oleh Depkominfo, diakses dari http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file=digital/125450=%5B_Konten_%5Dkonten%20C8661.pdf pada 15 Januari 2018
- Data korupsi dana desa oleh ICW, diakses dari <http://antikorupsi.org/news/cegahkorupsi-dana-desa diakses pada 29 Januari 2018>
- Dewanti, E. D. W. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, R. (2005). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta)* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Hendri, S., Ardania, N. P. C. A., Rakhmawati, I., & Atikah, S. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah*.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangn Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). In *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*.
- _____. *Keputusan Lurah Desa Tamantirto No 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mayowan, Y. (2017). *Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*. *Profit (Jurnal Administrasi Bisnis)*, 10(1), 14-23.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Muzahid, M. (2014). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 2(2), 179-196.
- _____. *Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa*
- _____. *Peraturan Desa Tamantirto No 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.

_____Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

_____Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Supriadi,E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 3(2).

Tim Visi Yustisia. (2016). Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa.Jakarta: Visimedia.

Umami, R & Nurodin, I (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(11).